



**SALINAN**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 10 TAHUN 2020**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi

Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
  - (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
    - a. gubernur;
    - b. wakil gubernur;
    - c. pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV;
    - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
    - e. pejabat fungsional auditor;
    - f. pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah di daerah;
    - g. pejabat fungsional auditor kepegawaian;
    - h. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
    - i. Pejabat Pengelola Keuangan;
    - j. pejabat yang mengeluarkan perizinan; dan
    - k. penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.
  - (3) Daftar Penyelenggara Negara yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah;
  - b. wakil koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Daerah;
  - c. wakil koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
  - d. administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk Gubernur sebagai Admin Instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam **www.elhkpn.kpk.go.id**;
  - b. administrator bertugas untuk :
    - 1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;

- 2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
  - 3) Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
  - 4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.
- (4) Unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, diberikan sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai.
- (2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 14 April 2020  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
**ttd**

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT****NOMOR : 10 TAHUN 2020****TANGGAL : 14-Apr-20****TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
1	KEPALA LEMBAGA	PIMPINAN TERTINGGI	GUBERNUR	0
2	WAKIL KEPALA LEMBAGA	WAKIL PIMPINAN	WAKIL GUBERNUR	0
3	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	I
4	ASISTEN	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	II
5	ASISTEN	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	II
6	ASISTEN	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	II
7	<b>BIRO HUKUM</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	KEPALA BIRO	II
8	BIRO HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN DOKUMENTASI PRODUK HUKUM DAN TATA USAHA BIRO	III
9	BIRO HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH		IV
10	BIRO HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI PRODUK HUKUM	IV
11	BIRO HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	IV
12	BIRO HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	III
13	BIRO HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	IV
14	BIRO HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAN PRODUK HUKUM LAINNYA	IV
15	BIRO HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PENGKAJIAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH	IV
16	BIRO HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM	III
17	BIRO HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN LITIGASI	IV
18	BIRO HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN NON LITIGASI	IV
19	BIRO HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAM	IV
20	BIRO HUKUM	SEKRETARIAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
21	<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	KEPALA BIRO	II
22	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	III
23	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN KEAGAMAAN	III
24	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN ORMAS	III
25	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	IV
26	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	IV
27	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI KEAGAMAAN	IV
28	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	IV
29	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN BINA MENTAL DAN SPIRITUAL	IV
30	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI ORMAS	IV
31	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI KESEHATAN MASYARAKAT	IV
32	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PERIBADATAN	IV
33	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI ORMAS	IV
34	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	IV
35	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
36	<b>BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	KEPALA BIRO	II
37	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN	III
38	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN TATA LAKSANA DAN REFORMASI BIROKRASI	III
39	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK	III
40	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	IV
41	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN ANALISA DAN FORMASI JABATAN	IV
42	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KELEMBAGAAN SERTA KINERJA KABUPATEN/KOTA	IV
43	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN TATA KERJA DAN PROSEDUR	IV
44	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN REFORMASI BIROKRASI	IV

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
45	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	IV
46	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	IV
47	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN PUBLIK	IV
48	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	IV
49	BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	SEKRETARIAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
50	<b>BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN	IV
51	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN BINA PEMBANGUNAN	III
52	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	III
53	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	III
54	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	IV
55	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS PENDATAAN SARANA DAN PRASARANA	IV
56	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	IV
57	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PEREKONOMIAN	IV
58	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN BINA PRODUKSI DAN PEMASARAN PRODUK DAERAH	IV
59	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN PEREKONOMIAN	IV
60	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN PENGADAAN	IV
61	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN MONEV PENGADAAN	IV
62	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN DOKUMENTASI PENGADAAN	IV
63	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	IV
64	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	IV
65	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN	IV
66	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BIRO	
67	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
68	<b>BIRO TATA PEMERINTAHAN</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
69	BIRO TATA PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BIRO	II
70	BIRO TATA PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	III
71	BIRO TATA PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH	III
72	BIRO TATA PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN KAWASAN DAN AGRARIA	III
73	BIRO TATA PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN TOPONOMI DAN BATAS DAERAH	IV
74	BIRO TATA PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJA SAMA	IV
75	BIRO TATA PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	IV
76	BIRO TATA PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PENATAAN DAERAH OTONOM	IV
77	BIRO TATA PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH	IV
78	BIRO TATA PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI KEPALA DAERAH DAN DPRD	IV
79	BIRO TATA PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN TANAH DAN PENSERTIFIKATAN	IV
80	BIRO TATA PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PENANGANAN KONFLIK DAN SENGKETA PERTANAHAN	IV
81	BIRO TATA PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PENATAAN KAWASAN	IV
82	<b>BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	KEPALA SUB BAGIAN PEMELIHARAAN, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN	IV
83	BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BIRO	II
84	BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
85	BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL	III
86	BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN	III
87	BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN VERIFIKASI, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN	IV
88	BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	IV
89	BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN ADMINISTRASI UMUM	IV
90	BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PIMPINAN	IV
91	BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA, TAMU PIMPINAN DAN AKOMODASI	IV
92	BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PEMELIHARAAN GEDUNG, KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN LAINNYA	IV
93	BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS KEBUTUHAN	IV
94	BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PENGADAAN	IV
95	BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN INVENTARISASI, PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN	IV
96	BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL	SEKRETARIAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
97	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	
98	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN	Non Eselon
99	STAF AHLI	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	II
100	STAF AHLI	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	II
101	STAF AHLI	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA APARATUR	II
102	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	KEPALA BADAN	II
103	BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	III
104	BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI	IV
105	BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER	IV
106	BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG KINERJA DAN KOMPETENSI PEGAWAI	IV
107	BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA PEGAWAI	III
108	BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PEGAWAI	IV
109	BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG DOKUMENTASI	IV
110	BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG INFORMASI DAN PELAPORAN	IV
111	BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN	III
112	BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG MUTASI JABATAN	IV
113	BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG MUTASI PINDAH	IV
114	BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN PENINJAUAN MASA KERJA	IV
115	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	III
116	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DAN DISIPLIN PEGAWAI	IV
117	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KESEJAHTERAAN DAN PENGHARGAAN PNS	IV
118	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENSUN, PEMBINAAN MENTAL DAN JASMANI PNS	IV
119	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	III
120	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DAN DISIPLIN PEGAWAI	IV
121	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN KESEJAHTERAAN DAN PENGHARGAAN PNS	IV
122	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENSUN, PEMBINAAN MENTAL DAN JASMANI PNS	IV
123	SEKRETARIAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	SEKRETARIS	III
124	SEKRETARIAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
125	SEKRETARIAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
126	SEKRETARIAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
127	SEKRETARIAT	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	
128	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	KEPALA BADAN	II
129	BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	III
130	BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI	IV
131	BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN	IV
132	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	IV
133	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI, PENGAWASAN ORANG DAN LEMBAGA ASING	III
134	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KERJASAMA INTELKAM	IV
135	BIDANG POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BIDANG POLITIK	IV
136	BIDANG POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA SUB BIDANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENDIDIKAN POLITIK	IV
137	BIDANG POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA SUB BIDANG KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DAN FASILITAS PEMILU	IV
138	BIDANG SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BIDANG SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI	IV
139	BIDANG SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA	IV
140	BIDANG SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN AGAMA, KEMASYARAKATAN EKONOMI	III
141	SEKRETARIAT	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKRETARIS	III
142	SEKRETARIAT	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
143	SEKRETARIAT	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	IV
144	SEKRETARIAT	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
145	SEKRETARIAT	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BENDAHARA PENGELUARAN	
146	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	KEPALA BADAN	II
147	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	III
148	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA SUB BIDANG KEDARURATAN	IV
149	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA SUB BIDANG LOGISTIK	IV
150	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	III
151	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENCEGAHAN	IV
152	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN	IV
153	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	III
154	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA SUB BIDANG REHABILITASI	IV
155	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA SUB BIDANG REKONSTRUKSI	IV
156	SEKRETARIAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SEKRETARIS	III
157	SEKRETARIAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
158	SEKRETARIAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
159	SEKRETARIAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
160	SEKRETARIAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	
161	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	KEPALA BADAN	II
162	BIDANG EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH	III
163	BIDANG EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG EKONOMI, PERTANIAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	IV
164	BIDANG EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG FISIK DAN PRASARANA WILAYAH	IV
165	BIDANG EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN	IV



NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
166	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	III
167	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN	IV
168	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA	IV
169	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN SDM	IV
170	BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK	III
171	BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN IPTEK	IV
172	BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENERAPAN IPTEK	IV
173	BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG SOSIALISASI DAN PUBLIKASI INOVASI DAN TEKNOLOGI	IV
174	SEKRETARIAT	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SEKRETARIS	III
175	SEKRETARIAT	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM, UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
176	SEKRETARIAT	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	IV
177	SEKRETARIAT	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	
178	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>	KEPALA BADAN	II
179	BIDANG AKUNTANSI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	III
180	BIDANG AKUNTANSI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI KEUANGAN	IV
181	BIDANG AKUNTANSI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI BARANG MILIK DAERAH	IV
182	BIDANG AKUNTANSI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	IV
183	BIDANG ANGGARAN DAN BINA KAB/KOTA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN BINA KAB/KOTA	III
184	BIDANG ANGGARAN DAN BINA KAB/KOTA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	IV
185	BIDANG ANGGARAN DAN BINA KAB/KOTA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN	IV
186	BIDANG ANGGARAN DAN BINA KAB/KOTA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG BINA KABUPATEN/KOTA	IV
187	BIDANG PENDAPATAN NON PAJAK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA BIDANG PENDAPATAN NON PAJAK DAERAH	III
188	BIDANG PENDAPATAN NON PAJAK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN RETRIBUSI	IV
189	BIDANG PENDAPATAN NON PAJAK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER	IV
190	BIDANG PENDAPATAN NON PAJAK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN	IV
191	BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH	III
192	BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI	IV
193	BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN	IV
194	BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN	IV
195	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
196	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGADAAN	IV
197	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENGGUNAAN, PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN	IV
198	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN	IV
199	BIDANG PERBENDAHARAAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	III
200	BIDANG PERBENDAHARAAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG	IV
201	BIDANG PERBENDAHARAAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN	IV
202	BIDANG PERBENDAHARAAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	IV
203	SEKRETARIAT	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	SEKRETARIS	III
204	SEKRETARIAT	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
205	SEKRETARIAT	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	IV
206	SEKRETARIAT	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
207	SEKRETARIAT	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	
208	SEKRETARIAT	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN	
209	SEKRETARIAT	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	
210	UPTB	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA UPTB SAMSAT KABUPATEN MAMUJU	
211	UPTB	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA UPTB SAMSAT KABUPATEN MAMUJU UTARA	
212	UPTB	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA UPTB SAMSAT KABUPATEN MAMASA	
213	UPTB	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA UPTB SAMSAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR	
214	UPTB	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA UPTB SAMSAT KABUPATEN MAJENE	
215	UPTB	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV
216	UPTB	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
217	UPTB	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SEKSI PENDAPATAN DAN PENETAPAN	IV
218	UPTB	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	KEPALA SEKSI PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN	IV
219	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	KEPALA BADAN	II
220	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	III
221	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI	IV
222	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL	IV
223	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN	IV
224	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIK	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIK	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
225	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI UMUM DAN PILIHAN JABATAN ADMINISTRASI	IV
226	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI JABATAN ADMINISTRASI	IV
227	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI JABATAN ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH PENUNJANG	IV
228	BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN	III
229	BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI	IV
230	BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN TENAGA PENGEMBANGAN KOMPETENSI	IV
231	BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR DAN KERJASAMA	IV
232	SEKRETARIAT	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SEKRETARIS	III
233	SEKRETARIAT	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
234	SEKRETARIAT	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
235	SEKRETARIAT	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BENDAHARA PENGELUARAN	
236	<b>BADAN PENGHUBUNG</b>	<b>BADAN PENGHUBUNG</b>	KEPALA BADAN	III
237	SEKRETARIAT	BADAN PENGHUBUNG	KEPALA SUB BIDANG TATA USAHA	IV
238	SEKRETARIAT	BADAN PENGHUBUNG	KEPALA SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	IV
239	SEKRETARIAT	BADAN PENGHUBUNG	KEPALA SUB BIDANG PROMOSI, DATA DAN INFORMASI DAERAH	IV
240	SEKRETARIAT	BADAN PENGHUBUNG	KEPALA SUB BIDANG SARANA DAN PELAYANAN	IV
241	SEKRETARIAT	BADAN PENGHUBUNG	BENDAHARA PENGELUARAN	
242	SEKRETARIAT	BADAN PENGHUBUNG	BENDAHARA PENERIMAAN	
243	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	KEPALA BADAN	II
244	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	III
245	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG INFRASTRUKTUR	IV
246	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG KEWILAYAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	IV
247	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	IV
248	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	III
249	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN	IV
250	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	IV
251	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEPENDUDUKAN	IV
252	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	III
253	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN	IV
254	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA ALAM	IV
255	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI	IV
256	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	III
257	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN	IV
258	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI	IV
259	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	IV
260	SEKRETARIAT	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SEKRETARIS	III
261	SEKRETARIAT	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
262	SEKRETARIAT	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
263	SEKRETARIAT	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
264	SEKRETARIAT	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
265	SEKRETARIAT	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BENDAHARA APBN	Non Eselon
266	<b>BIDANG ENERGI</b>	<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	KEPALA BIDANG ENERGI	III
267	BIDANG ENERGI	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SEKSI KONSERVASI ENERGI	IV
268	BIDANG ENERGI	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN	IV
269	BIDANG ENERGI	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	IV
270	BIDANG GEOLOGI DAN AIR BAWAH TANAH	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA BIDANG GEOLOGI DAN AIR BAWAH TANAH	III
271	BIDANG GEOLOGI DAN AIR BAWAH TANAH	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SEKSI PEMETAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	IV
272	BIDANG GEOLOGI DAN AIR BAWAH TANAH	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SEKSI KONSERVASI AIR TANAH	IV
273	BIDANG GEOLOGI DAN AIR BAWAH TANAH	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN AIR TANAH	IV
274	BIDANG KETENAGALISTRIKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN	III
275	BIDANG KETENAGALISTRIKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN	IV
276	BIDANG KETENAGALISTRIKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN	IV
277	BIDANG KETENAGALISTRIKAN	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KETENAGALISTRIKAN	IV
278	BIDANG MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA)	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA BIDANG MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA)	III
279	BIDANG MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA)	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SEKSI PEMETAAN WILAYAH IZIN MINERBA	IV
280	BIDANG MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA)	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN MINERBA	IV
281	BIDANG MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA)	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SEKSI PRODUKSI DAN PENJUALAN MINERBA	IV
282	<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	KEPALA DINAS	II
283	SEKRETARIAT	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	SEKRETARIS	III
284	SEKRETARIAT	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
285	SEKRETARIAT	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
286	SEKRETARIAT	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
287	SEKRETARIAT	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	BENDAHARA PENGELUARAN	
288	UPTD	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA UPTD LABORATORIUM	
289	UPTD	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA UPTD WILAYAH I (KABUPATEN MAMUJU UTARA DAN MAMUJU TENGAH)	
290	UPTD	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA UPTD WILAYAH II (KABUPATEN MAMUJU DAN MAMASA)	
291	UPTD	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA UPTD WILAYAH III (KABUPATEN POLEWALI MANDAR DAN MAJENE)	
292	UPTD	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV
293	UPTD	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SEKSI JASA PERALATAN PEMBORAN, EKSPLORASI DAN PRODUKSI	0
294	UPTD	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KEPALA SEKSI JASA LABORATORIS DAN DATA INFORMASI GEOGRAFIS	IV
295	<b>BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>DINAS KEHUTANAN</b>	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL	III
296	BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL	DINAS KEHUTANAN	KEPALA SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	IV
297	BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL	DINAS KEHUTANAN	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAS	IV
298	BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL	DINAS KEHUTANAN	KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL	IV
299	BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE)	DINAS KEHUTANAN	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE)	III
300	BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE)	DINAS KEHUTANAN	KEPALA SEKSI PENGAMANAN HUTAN	IV
301	BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE)	DINAS KEHUTANAN	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	IV
302	BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE)	DINAS KEHUTANAN	KEPALA SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM (KSDAE)	IV

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
303	BIDANG TATA GUNA DAN PEMANFAATAN HUTAN	DINAS KEHUTANAN	KEPALA BIDANG TATA GUNA DAN PEMANFAATAN HUTAN	III
304	BIDANG TATA GUNA DAN PEMANFAATAN HUTAN	DINAS KEHUTANAN	KEPALA SEKSI TATA GUNA HUTAN	IV
305	BIDANG TATA GUNA DAN PEMANFAATAN HUTAN	DINAS KEHUTANAN	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN HUTAN	IV
306	BIDANG TATA GUNA DAN PEMANFAATAN HUTAN	DINAS KEHUTANAN	KEPALA SEKSI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH)	IV
307	<b>DINAS KEHUTANAN</b>	<b>DINAS KEHUTANAN</b>	KEPALA DINAS	II
308	SEKRETARIAT	DINAS KEHUTANAN	SEKRETARIS	III
309	SEKRETARIAT	DINAS KEHUTANAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	IV
310	SEKRETARIAT	DINAS KEHUTANAN	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
311	SEKRETARIAT	DINAS KEHUTANAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
312	SEKRETARIAT	DINAS KEHUTANAN	BENDAHARA APBN	Non Eselon
313	SEKRETARIAT	DINAS KEHUTANAN	BENDAHARA PENERIMAAN	Non Eselon
314	UPTD	DINAS KEHUTANAN	KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LARIANG	
315	UPTD	DINAS KEHUTANAN	KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SARUDU	
316	UPTD	DINAS KEHUTANAN	KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PASANGKAYU	
317	UPTD	DINAS KEHUTANAN	KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BUDONG-BUDONG	
318	UPTD	DINAS KEHUTANAN	KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAROSSA	
319	UPTD	DINAS KEHUTANAN	KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KARAMA	
320	UPTD	DINAS KEHUTANAN	KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BONEHAU KALUMPANG	
321	UPTD	DINAS KEHUTANAN	KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MALUNDA	
322	UPTD	DINAS KEHUTANAN	KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MAPILLI	
323	UPTD	DINAS KEHUTANAN	KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MAMASA TENGAH	
324	UPTD	DINAS KEHUTANAN	KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MAMASA TIMUR	
325	UPTD	DINAS KEHUTANAN	KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MAMASA BARAT	
326	UPTD	DINAS KEHUTANAN	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV
327	UPTD	DINAS KEHUTANAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
328	UPTD	DINAS KEHUTANAN	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMAMFAATAN HUTAN	IV
329	UPTD	DINAS KEHUTANAN	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT	IV
330	<b>BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	KEPALA BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	III
331	BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	IV
332	BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA SEKSI KONSERVASI DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN	IV
333	BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM	IV
334	BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	III
335	BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN PEMASARAN	IV
336	BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGOLAHAN MUTU PRODUK	IV
337	BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA SEKSI KEMITRAAN USAHA, INVESTASI DAN PROMOSI	IV
338	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	III
339	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA SEKSI PRODUKSI BUDIDAYA	IV
340	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA BUDIDAYA	IV
341	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	IV
342	BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN TATA RUANG KELAUTAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN TATA RUANG KELAUTAN	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
343	BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN TATA RUANG KELAUTAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA SEKSI PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN	IV
344	BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN TATA RUANG KELAUTAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENANGKAPAN IKAN	IV
345	BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN TATA RUANG KELAUTAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA SEKSI KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	IV
346	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	KEPALA DINAS	II
347	SEKRETARIAT	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	SEKRETARIS	III
348	SEKRETARIAT	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
349	SEKRETARIAT	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
350	SEKRETARIAT	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
351	SEKRETARIAT	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
352	UPTD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA UPTD PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) PALIPI	
353	UPTD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN PANTAI (BBIP) PONIANG	
354	UPTD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA UPTD BALAI BENIH BUDIDAYA AIR TAWAR (B3AT) TAMALLANTIK	
355	UPTD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV
356	UPTD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
357	<b>BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	KEPALA BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN	III
358	BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PEMUDA	IV
359	BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PEMUDA	IV
360	BIDANG LAYANAN KEPEMUDAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN KEMITRAAN PEMUDA	IV
361	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	III
362	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN SENTRA OLAHRAGA	IV
363	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA SEKSI OLAHRAGA REKREASI, TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS	IV
364	BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA SEKSI KEMITRAAN, PENGHARGAAN DAN OLAHRAGA	IV
365	BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	III
366	BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA SEKSI PEMBIBITAN, IPTEK DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN	IV
367	BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA SEKSI PROMOSI OLAHRAGA DAN OLAHRAGA PRESTASI	IV
368	BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA SEKSI STANDARDISASI DAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA	IV
369	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA DINAS	II
370	SEKRETARIAT	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	SEKRETARIS	III
371	SEKRETARIAT	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	IV
372	SEKRETARIAT	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
373	SEKRETARIAT	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	BENDAHARA PENGELUARAN	
374	UPTD	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA UPTD PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR (PPLP)	
375	UPTD	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV
376	UPTD	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
377	<b>BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	KEPALA BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL	III
378	BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA SEKSI FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PENCATATAN SIPIL	IV
379	BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA SEKSI BINA APARATUR PENCATATAN SIPIL	IV
380	BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN DOKUMENTASI	IV
381	BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK	III
382	BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA SEKSI FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDAFTARAN PENDUDUK	IV
383	BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK	IV
384	BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN DOKUMENTASI	IV

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
385	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA	III
386	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	IV
387	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	IV
388	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	IV
389	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	KEPALA DINAS	II
390	SEKRETARIAT	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIS	III
391	SEKRETARIAT	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
392	SEKRETARIAT	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
393	SEKRETARIAT	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BENDAHARA PENGELUARAN	
394	<b>BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	III
395	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	IV
396	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	IV
397	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	IV
398	BIDANG KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	DINAS KESEHATAN	KEPALA BIDANG KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	III
399	BIDANG KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	DINAS KESEHATAN	KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	IV
400	BIDANG KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	DINAS KESEHATAN	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	IV
401	BIDANG KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	DINAS KESEHATAN	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	IV
402	BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA	DINAS KESEHATAN	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA	III
403	BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA	DINAS KESEHATAN	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN	IV
404	BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA	DINAS KESEHATAN	KEPALA SEKSI KEFARMASIAN DAN ALKES	IV
405	BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA	DINAS KESEHATAN	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	IV
406	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	KEPALA DINAS	II
407	SEKRETARIAT	DINAS KESEHATAN	SEKRETARIS	III
408	SEKRETARIAT	DINAS KESEHATAN	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
409	SEKRETARIAT	DINAS KESEHATAN	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
410	SEKRETARIAT	DINAS KESEHATAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
411	UPTD	DINAS KESEHATAN	KEPALA UPTD BALAI LAYANAN KESEHATAN	
412	UPTD	DINAS KESEHATAN	KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI	
413	UPTD	DINAS KESEHATAN	KEPALA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN	
414	UPTD	DINAS KESEHATAN	KEPALA UPTD TRANSFUSI DARAH	
415	UPTD	DINAS KESEHATAN	KEPALA UPTD RUMAH SAKIT	
416	UPTD	DINAS KESEHATAN	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV
417	UPTD	DINAS KESEHATAN	KEPALA SEKSI PELAYANAN	IV
418	UPTD	DINAS KESEHATAN	KEPALA SEKSI PEMANTAPAN MUTU DAN BIMBINGAN TEKNIS	IV
419	UPTD	DINAS KESEHATAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
420	<b>BIDANG DISTRIBUSI, CADANGAN DAN HARGA PANGAN</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>	KEPALA BIDANG DISTRIBUSI, CADANGAN DAN HARGA PANGAN	III
421	BIDANG DISTRIBUSI, CADANGAN DAN HARGA PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PANGAN	IV
422	BIDANG DISTRIBUSI, CADANGAN DAN HARGA PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA SEKSI CADANGAN PANGAN	IV

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
423	BIDANG DISTRIBUSI, CADANGAN DAN HARGA PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA SEKSI HARGA PANGAN	IV
424	BIDANG KETERSEDIAAN, SUMBER DAYA DAN KERAWANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	BIDANG KETERSEDIAAN, SUMBER DAYA DAN KERAWANAN PANGAN	III
425	BIDANG KETERSEDIAAN, SUMBER DAYA DAN KERAWANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	IV
426	BIDANG KETERSEDIAAN, SUMBER DAYA DAN KERAWANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA PANGAN	IV
427	BIDANG KETERSEDIAAN, SUMBER DAYA DAN KERAWANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA SEKSI KERAWANAN PANGAN	IV
428	BIDANG PENGANEKARAGAMAN, KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA BIDANG PENGANEKARAGAMAN, KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	III
429	BIDANG PENGANEKARAGAMAN, KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA SEKSI PENGANEKARAGAMAN PANGAN	IV
430	BIDANG PENGANEKARAGAMAN, KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA SEKSI KONSUMSI PANGAN	IV
431	BIDANG PENGANEKARAGAMAN, KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA SEKSI KEAMANAN PANGAN	IV
432	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>	KEPALA DINAS	II
433	SEKRETARIAT	DINAS KETAHANAN PANGAN	SEKRETARIS	III
434	SEKRETARIAT	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
435	SEKRETARIAT	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
436	SEKRETARIAT	DINAS KETAHANAN PANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
437	UPTD	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (BSP-PSAT)	
438	UPTD	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV
439	UPTD	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA SEKSI MANAJER TEKNIS	IV
440	UPTD	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA SEKSI MANAJER MUTU	IV
441	<b>BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK</b>	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	III
442	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA SEKSI KEHUMASAN DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK	IV
443	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	IV
444	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	IV
445	BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT	III
446	BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI SPBE	IV
447	BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA SEKSI APLIKASI DAN SISTEM INFORMASI SPBE	IV
448	BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK DAN KEAMANAN SPBE	IV
449	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	III
450	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	IV
451	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA SEKSI EDUKASI DAN ADVOKASI INFORMASI PUBLIK	IV
452	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI KELEMBAGAAN INFORMASI PUBLIK	IV
453	BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK PUBLIK	III
454	BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI	IV
455	BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA SEKSI STATISTIK DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	IV



NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
456	BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA SEKSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI	IV
457	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK</b>	KEPALA DINAS	II
458	SEKRETARIAT	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	SEKRETARIS	III
459	SEKRETARIAT	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
460	SEKRETARIAT	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
461	SEKRETARIAT	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
462	SEKRETARIAT	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	BENDAHARA PENGELUARAN	
463	UPTD	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA UPTD RADIO SIARAN BANUA MALAQBI	
464	UPTD	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV
465	UPTD	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
466	<b>BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH	III
467	BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	IV
468	BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN	IV
469	BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	IV
470	BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS	III
471	BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH	IV
472	BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3	IV
473	BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	IV
474	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	III
475	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	IV
476	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	IV
477	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA SEKSI PEMELIHARAN LINGKUNGAN	IV
478	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	KEPALA DINAS	II
479	SEKRETARIAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SEKRETARIS	III
480	SEKRETARIAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
481	SEKRETARIAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
482	SEKRETARIAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BENDAHARA PENGELUARAN	
483	UPTD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	
484	UPTD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV
485	UPTD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
486	<b>BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PARIWISATA</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PARIWISATA	III
487	BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN KEMITRAAN	IV
488	BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	KEPALA SEKSI STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	IV
489	BIDANG KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	KEPALA SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN	IV

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
490	BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	III
491	BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	KEPALA SEKSI ANALISIS PASAR PARIWISATA	IV
492	BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	KEPALA SEKSI PROMOSI WISATA	IV
493	BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	KEPALA SEKSI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PARIWISATA	IV
494	BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PENGENDALIAN INDUSTRI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PENGENDALIAN INDUSTRI PARIWISATA	III
495	BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PENGENDALIAN INDUSTRI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN USAHA JASA DAN SARANA PRASARANA PARIWISATA	IV
496	BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PENGENDALIAN INDUSTRI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN EKONOMI KREATIF	IV
497	BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PENGENDALIAN INDUSTRI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN INVESTASI DAN PERIZINAN PARIWISATA	IV
498	BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	III
499	BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN WISATA ALAM, BUATAN DAN MINAT KHUSUS	IV
500	BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA DAN RELIGI	IV
501	BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA	IV
502	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>	KEPALA DINAS	II
503	SEKRETARIAT	DINAS PARIWISATA	SEKRETARIS	III
504	SEKRETARIAT	DINAS PARIWISATA	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
505	SEKRETARIAT	DINAS PARIWISATA	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
506	SEKRETARIAT	DINAS PARIWISATA	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
507	SEKRETARIAT	DINAS PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN	
508	SEKRETARIAT	DINAS PARIWISATA	BENDAHARA PENERIMAAN	
509	SEKRETARIAT	DINAS PARIWISATA	BENDAHARA APBN	Non Eselon
510	UPTD	DINAS PARIWISATA	KEPALA UPTD TAMAN WISATA GENTUNGAN	
511	UPTD	DINAS PARIWISATA	KEPALA UPTD ANJUNGAN SULAWESI BARAT DI TMII JAKARTA	
512	UPTD	DINAS PARIWISATA	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV
513	UPTD	DINAS PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
514	<b>BIDANG BINA MARGA</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	KEPALA BIDANG BINA MARGA	III
515	BIDANG BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN	IV
516	BIDANG BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN	IV
517	BIDANG BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS	IV
518	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA	III
519	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI AIR MINUM	IV
520	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI PENYEHAATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	IV
521	BIDANG CIPTA KARYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	IV
522	BIDANG CIPTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA BIDANG CIPTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	III
523	BIDANG CIPTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI IRIGASI DAN RAWA	IV
524	BIDANG CIPTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI SUNGAI, PANTAI DAN WADUK	IV
525	BIDANG CIPTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI BINA MANFAAT IRIGASI, RAWA, PANTAI DAN SUNGAI	IV
526	BIDANG TATA BINA JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI	III
527	BIDANG TATA BINA JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI	IV
528	BIDANG TATA BINA JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI KERJA SAMA, PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN SDM	IV
529	BIDANG TATA BINA JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI	IV
530	BIDANG TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA BIDANG TATA RUANG	III
531	BIDANG TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	IV

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
532	BIDANG TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN RUANG	IV
533	BIDANG TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	IV
534	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	KEPALA DINAS	II
535	SEKRETARIAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SEKRETARIS	III
536	SEKRETARIAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
537	SEKRETARIAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
538	SEKRETARIAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BENDAHARA PENGELUARAN	
539	SEKRETARIAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BENDAHARA APBN	Non Eselon
540	SEKRETARIAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BENDAHARA PENERIMAAN	Non Eselon
541	UPTD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	
542	UPTD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA UPTD PENGUJIAN DAN STANDARISASI	
543	UPTD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA UPTD WILAYAH SUNGAI	
544	UPTD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV
545	UPTD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
546	UPTD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI STANDARISASI	IV
547	UPTD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI PENGUJIAN	IV
548	UPTD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI JALAN DAN JEMBATAN	IV
549	UPTD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI PERALATAN DAN BAHAN JALAN	IV
550	UPTD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS	IV
551	UPTD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA SEKSI OPERASIONAL PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN	IV
552	<b>BIDANG PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	KEPALA BIDANG PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA	III
553	BIDANG PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA SEKSI PELAYANAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	IV
554	BIDANG PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA SEKSI ADAT BUDAYA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	IV
555	BIDANG PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA	IV
556	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA	III
557	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA SEKSI PENATAAN ADM. PEMERINTAHAN DESA & PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	IV
558	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA	IV
559	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN	IV
560	BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	III
561	BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM	IV
562	BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	IV
563	BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	IV
564	BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	III
565	BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN BUMDESA DAN PERMODALAN DESA	IV
566	BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA SEKSI PERDAGANGAN DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA	IV
567	BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	IV
568	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	KEPALA DINAS	II
569	SEKRETARIAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SEKRETARIS	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
570	SEKRETARIAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
571	SEKRETARIAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
572	SEKRETARIAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
573	SEKRETARIAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BENDAHARA PENGELUARAN	
574	<b>BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KELUARGA, DATA DAN INFORMASI</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KELUARGA, DATA DAN INFORMASI	III
575	BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KELUARGA, DATA DAN INFORMASI	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI	IV
576	BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KELUARGA, DATA DAN INFORMASI	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK DAN HUKUM	IV
577	BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KELUARGA, DATA DAN INFORMASI	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG KUALITAS KELUARGA, DATA DAN INFORMASI	IV
578	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	III
579	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SEKSI PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA	IV
580	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SEKSI HAK SIPIL, INFORMASI DAN PARTISIPASI	IV
581	BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SEKSI KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAAAN	IV
582	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	III
583	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESERTAAN KB	IV
584	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA	IV
585	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SEKSI PEMADUAN DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENDUDUK	IV
586	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	III
587	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN	IV
588	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	IV
589	BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SEKSI DATA KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK	IV
590	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	KEPALA DINAS	II
591	SEKRETARIAT	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SEKRETARIS	III
592	SEKRETARIAT	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
593	SEKRETARIAT	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
594	SEKRETARIAT	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
595	SEKRETARIAT	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BENDAHARA PENGELUARAN	
596	UPTD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA UPTD PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	
597	UPTD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV
598	UPTD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
599	UPTD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA SEKSI PENGADUAN	IV
600	<b>BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	III
601	BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN	IV
602	BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI KEBIJAKAN DAN ADVOKASI LAYANAN	IV
603	BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI PELAPORAN LAYANAN	IV
604	BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	III
605	BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	IV
606	BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	IV
607	BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	IV
608	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A	III
609	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/I	IV
610	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/II	IV
611	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/III	IV
612	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B	III
613	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/I	IV
614	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/II	IV
615	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/III	IV
616	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	III
617	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	IV
618	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI DEREGLASI PENANAMAN MODAL	IV
619	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA	IV
620	BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
621	BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	IV
622	BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	IV
623	BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PROMOSI PENANAMAN MODAL	IV
624	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	KEPALA DINAS	II
625	SEKRETARIAT	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SEKRETARIS	III
626	SEKRETARIAT	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
627	SEKRETARIAT	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
628	SEKRETARIAT	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BENDAHARA PENGELUARAN	
629	<b>BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN	III
630	BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	IV
631	BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI SEJARAH DAN TRADISI	IV
632	BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI KESENIAN DAN TENAGA KEBUDAYAAN	IV
633	BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS	III
634	BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	IV
635	BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	IV
636	BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEM. KARAKTER	IV
637	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	III
638	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	IV
639	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	IV
640	BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER	IV
641	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	III
642	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI PTK SMA	IV
643	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI PTK SMK	IV
644	BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI PTK KHUSUS	IV
645	BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS,TUGAS PEMBANTUAN PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS,TUGAS PEMBANTUAN PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR	III
646	BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS,TUGAS PEMBANTUAN PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN TP PAUD DAN DIKDAS	IV
647	BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS,TUGAS PEMBANTUAN PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA / PRASARANA TP PAUD DAN DIKDAS	IV
648	BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS,TUGAS PEMBANTUAN PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER TP PAUD DIKDAS	IV
649	CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA CABANG DINAS WILAYAH I	III
650	CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA WILAYAH I	IV
651	CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA CAB. DINAS WILAYAH I	IV
652	CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK CAB. DINAS WILAYAH I	IV
653	CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA CABANG DINAS WILAYAH II	III
654	CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA WILAYAH II	IV
655	CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMA CAB. DINAS WILAYAH II	IV
656	CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SMK CAB. DINAS WILAYAH II	IV
657	CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA CABANG DINAS WILAYAH III	
658	CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA WILAYAH III	
659	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	KEPALA DINAS	II
660	SEKRETARIAT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SEKRETARIS	III
661	SEKRETARIAT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
662	SEKRETARIAT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
663	SEKRETARIAT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
664	SEKRETARIAT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
665	UPTD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN (BPTKP)	
666	UPTD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
667	UPTD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	0
668	UPTD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI PENYAJIAN DAN PENATAAN	IV
669	UPTD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI PENYAJIAN DAN LAYANAN EDUKASI	IV
670	UPTD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA UPTD BP TIK PK	III
671	UPTD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV
672	UPTD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN	IV
673	UPTD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKSI EVALUASI	IV
674	<b>BIDANG KOPERASI DAN UKM</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM</b>	KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UKM	III
675	BIDANG KOPERASI DAN UKM	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA SEKSI KOPERASI	IV
676	BIDANG KOPERASI DAN UKM	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA SEKSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	IV
677	BIDANG KOPERASI DAN UKM	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN, PEMBIAYAAN DAN PROMOSI	IV
678	BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	III
679	BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA SEKSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	IV
680	BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA SEKSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	IV
681	BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	IV
682	BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	III
683	BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA SEKSI STANDARDISASI TEKNOLOGI IKM, ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA	IV
684	BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI	IV
685	BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA SEKSI PROMOSI, INFORMASI DAN KERJA SAMA INDUSTRI	IV
686	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA DINAS	II
687	SEKRETARIAT	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	SEKRETARIS	III
688	SEKRETARIAT	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
689	SEKRETARIAT	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
690	SEKRETARIAT	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	BENDAHARA PENGELUARAN	
691	UPTD	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA UPTD BALAI PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)	
692	UPTD	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA SEKSI PENGUJIAN UPTD BPSMB	IV
693	UPTD	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA SEKSI JAMINAN MUTU	IV
694	UPTD	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV
695	<b>BIDANG PERHUBUNGAN DARAT</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT	III
696	BIDANG PERHUBUNGAN DARAT	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA SEKSI ANGKUTAN DARAT DAN KESELAMATAN LLAJ	IV
697	BIDANG PERHUBUNGAN DARAT	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	IV
698	BIDANG PERHUBUNGAN DARAT	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA JALAN	IV
699	BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA	III
700	BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN DAN KEBANDARUDARAAN	IV
701	BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA SEKSI ANGKUTAN LAUT DAN UDARA	IV
702	BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA SEKSI KESELAMATAN MARITIM DAN PENERBANGAN	IV
703	BIDANG PERKERETAAPIAN DAN ASP	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA BIDANG PERKERETAAPIAN DAN ASP	III
704	BIDANG PERKERETAAPIAN DAN ASP	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA SEKSI ANGKUTAN DAN KESELAMATAN PERKERETAPIAN	IV
705	BIDANG PERKERETAAPIAN DAN ASP	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERKERETAPIAN	IV

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
706	BIDANG PERKERETAAPIAN DAN ASP	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA SEKSI ANGKUTAN, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN	IV
707	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	KEPALA DINAS	II
708	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
709	SEKRETARIAT	DINAS PERHUBUNGAN	SEKRETARIS	III
710	SEKRETARIAT	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
711	SEKRETARIAT	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
712	SEKRETARIAT	DINAS PERHUBUNGAN	BENDAHARA PENERIMAAN	
713	SEKRETARIAT	DINAS PERHUBUNGAN	BENDAHARA APBN	Non Eselon
714	SEKRETARIAT	DINAS PERHUBUNGAN	BENDAHARA APBN	Non Eselon
715	SEKRETARIAT	DINAS PERHUBUNGAN	BENDAHARA PENERIMAAN	Non Eselon
716	UPTD	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA UPTD PERHUBUNGAN KABUPATEN MAMUJU UTARA	
717	UPTD	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA UPTD PERHUBUNGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH	
718	UPTD	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA UPTD PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJENE	
719	UPTD	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA UPTD PERHUBUNGAN KABUPATEN POLMAN	
720	UPTD	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA UPTD PERHUBUNGAN KABUPATEN MAMASA	
721	UPTD	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV
722	UPTD	DINAS PERHUBUNGAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
723	<b>BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL</b>	<b>DINAS PERKEBUNAN DAERAH</b>	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	III
724	BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA SEKSI STANDARDISASI, MUTU DAN PEMBINAAN USAHA	IV
725	BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA SEKSI PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL	IV
726	BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA SEKSI PEMASARAN HASIL	IV
727	BIDANG PERBENIHAN DAN PRODUKSI	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA BIDANG PERBENIHAN DAN PRODUKSI	III
728	BIDANG PERBENIHAN DAN PRODUKSI	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA SEKSI PERBENIHAN	IV
729	BIDANG PERBENIHAN DAN PRODUKSI	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA SEKSI TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR	IV
730	BIDANG PERBENIHAN DAN PRODUKSI	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA SEKSI TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH	IV
731	BIDANG PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	III
732	BIDANG PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA SEKSI DATA DAN KELEMBAGAAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	IV
733	BIDANG PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	IV
734	BIDANG PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA SEKSI GANGGUAN USAHA, DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN	IV
735	BIDANG PRASARANA DAN KELEMBAGAAN	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KELEMBAGAAN	III
736	BIDANG PRASARANA DAN KELEMBAGAAN	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA SEKSI LAHAN, IRIGASI, PEMBIAYAAN DAN INVESTASI	IV
737	BIDANG PRASARANA DAN KELEMBAGAAN	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN	IV
738	BIDANG PRASARANA DAN KELEMBAGAAN	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN	IV
739	<b>DINAS PERKEBUNAN DAERAH</b>	<b>DINAS PERKEBUNAN DAERAH</b>	KEPALA DINAS	II
740	SEKRETARIAT	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	SEKRETARIS	III
741	SEKRETARIAT	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
742	SEKRETARIAT	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
743	SEKRETARIAT	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
744	SEKRETARIAT	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	
745	UPTD BALAI PROTEKSI DAN PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA UPTD	III
746	UPTD BALAI PENGAWASAN SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN MUTU BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	KEPALA UPTD	III
747	<b>BIDANG DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, LAYANAN DAN PELESTARIAN</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	KEPALA BIDANG DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, LAYANAN DAN PELESTARIAN	III
748	BIDANG DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, LAYANAN DAN PELESTARIAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA SEKSI DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN	IV
749	BIDANG DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, LAYANAN DAN PELESTARIAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA SEKSI LAYANAN, OTOMASI DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN	IV
750	BIDANG DEPOSIT, PENGEMBANGAN KOLEKSI, LAYANAN DAN PELESTARIAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA SEKSI PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	IV



NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
751	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	III
752	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA SEKSI HUKUM DAN PEMBINAAN PENCIPTA ARSIP	IV
753	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA SEKSI PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN	IV
754	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN	IV
755	BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN ARSIP	III
756	BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN ARSIP	IV
757	BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA SEKSI PRESERVASI ARSIP	IV
758	BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA SEKSI LAYANAN DAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN	IV
759	BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEDEMOKRASI	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEDEMOKRASI	III
760	BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEDEMOKRASI	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	IV
761	BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEDEMOKRASI	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERPUSTAKAAN	IV
762	BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEDEMOKRASI	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PEMBUDAYAAN KEDEMOKRASI MEMBACA	IV
763	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	KEPALA DINAS	II
764	SEKRETARIAT	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SEKRETARIS	III
765	SEKRETARIAT	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
766	SEKRETARIAT	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
767	SEKRETARIAT	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPENGAWAIAN	IV
768	SEKRETARIAT	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
769	<b>BIDANG PERMUKIMAN</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	KEPALA BIDANG PERMUKIMAN	III
770	BIDANG PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA SEKSI PERMUKIMAN	IV
771	BIDANG PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	IV
772	BIDANG PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DAN PERDESAAN	IV
773	BIDANG PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	III
774	BIDANG PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA SEKSI PERUMAHAN UMUM DAN KOMERSIAL	IV
775	BIDANG PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	IV
776	BIDANG PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA SEKSI PERUMAHAN KHUSUS	IV
777	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	KEPALA DINAS	
778	SEKRETARIAT	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SEKRETARIS	III
779	SEKRETARIAT	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
780	SEKRETARIAT	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPENGAWAIAN	IV
781	SEKRETARIAT	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
782	SEKRETARIAT	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BENDAHARA APBN	Non Eselon
783	SEKRETARIAT	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BENDAHARA PENERIMAAN	Non Eselon
784	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	III
785	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	DINAS SOSIAL	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	IV
786	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	DINAS SOSIAL	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PERORANGAN, KELUARGA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT (PPKKM) SERTA PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL	IV
787	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	DINAS SOSIAL	KEPALA SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN	IV
788	BIDANG PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DINAS SOSIAL	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	III
789	BIDANG PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DINAS SOSIAL	KEPALA SEKSI KEAGAMAAN DAN SARANA PRASARANA PERIBADATAN	IV

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
790	BIDANG PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DINAS SOSIAL	KEPALA SEKSI BINA MENTAL SPIRITUAL	IV
791	BIDANG PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DINAS SOSIAL	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	IV
792	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	III
793	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	KEPALA SEKSI BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	IV
794	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	KEPALA SEKSI BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL DAN BENCANA LAIN	IV
795	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	KEPALA SEKSI JAMINAN SOSIAL	IV
796	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	III
797	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANSIA	IV
798	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	IV
799	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA, TUNA SOSIAL, KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	IV
800	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	KEPALA DINAS	II
801	SEKRETARIAT	DINAS SOSIAL	SEKRETARIS	III
802	SEKRETARIAT	DINAS SOSIAL	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
803	SEKRETARIAT	DINAS SOSIAL	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
804	SEKRETARIAT	DINAS SOSIAL	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
805	SEKRETARIAT	DINAS SOSIAL	BENDAHARA PENGELUARAN	
806	UPTD	DINAS SOSIAL	KEPALA UPTD PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	
807	<b>BIDANG HORTIKULTURA</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH</b>	KEPALA BIDANG HORTIKULTURA	III
808	BIDANG HORTIKULTURA	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN	IV
809	BIDANG HORTIKULTURA	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	KEPALA SEKSI PRODUKSI	IV
810	BIDANG HORTIKULTURA	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	IV
811	BIDANG PENYULUHAN, PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	KEPALA BIDANG PENYULUHAN, PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	III
812	BIDANG PENYULUHAN, PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	KEPALA SEKSI PENYULUHAN	IV
813	BIDANG PENYULUHAN, PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	KEPALA SEKSI LAHAN, IRIGASI, DAN PEMBIAYAAN	IV
814	BIDANG PENYULUHAN, PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	KEPALA SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN	IV
815	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	III
816	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	KEPALA SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI	IV
817	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	KEPALA SEKSI KESEHATAN HEWAN	IV
818	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	KEPALA SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN & PEMASARAN	IV
819	BIDANG TANAMAN PANGAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	BIDANG TANAMAN PANGAN	III
820	BIDANG TANAMAN PANGAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN	IV
821	BIDANG TANAMAN PANGAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	KEPALA SEKSI PRODUKSI	IV
822	BIDANG TANAMAN PANGAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	IV
823	<b>DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH</b>	KEPALA DINAS	II
824	SEKRETARIAT	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	SEKRETARIS	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
825	SEKRETARIAT	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
826	SEKRETARIAT	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
827	SEKRETARIAT	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
828	SEKRETARIAT	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	
829	<b>BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>	KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	III
830	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA SEKSI PERSYARATAN KERJA, KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA HUBUNGAN INDUSTRIAL	IV
831	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENGA KERJA	IV
832	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	IV
833	BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	III
834	BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	IV
835	BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	IV
836	BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM DAN LUAR NEGERI	IV
837	BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	III
838	BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	IV
839	BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA PEREMPUAN DAN ANAK	IV
840	BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	IV
841	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>	KEPALA DINAS	II
842	SEKRETARIAT	DINAS TENAGA KERJA	SEKRETARIS	III
843	SEKRETARIAT	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
844	SEKRETARIAT	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
845	SEKRETARIAT	DINAS TENAGA KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN	
846	UPTD	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I	
847	UPTD	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II	
848	UPTD	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA	
849	UPTD	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV
850	UPTD	DINAS TENAGA KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
851	BIDANG FASILITASI PERTANAHAN DAN PELATIHAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA BIDANG FASILITASI PERTANAHAN DAN PELATIHAN TRANSMIGRASI	III
852	BIDANG FASILITASI PERTANAHAN DAN PELATIHAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA SEKSI PENYEDIAAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI	IV
853	BIDANG FASILITASI PERTANAHAN DAN PELATIHAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI	IV
854	BIDANG FASILITASI PERTANAHAN DAN PELATIHAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSMIGRASI	IV
855	BIDANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI	III
856	BIDANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	IV
857	BIDANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA SEKSI PENATAAN DAN PERSEBARAN PENDUDUK	IV
858	BIDANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ANTAR DAERAH TRANSMIGRASI	IV
859	BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	III

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
860	BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	IV
861	BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN USAHA DAN SOSIAL BUDAYA	IV
862	BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN KERJA SAMA KELEMBAGAAN TRANSMIGRASI	IV
863	BIDANG PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA BIDANG PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN TRANSMIGRASI	III
864	BIDANG PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TRANSMIGRASI	IV
865	BIDANG PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA SEKSI BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI	IV
866	BIDANG PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA SEKSI PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSMIGRASI	IV
867	<b>DINAS TRANSMIGRASI</b>	<b>DINAS TRANSMIGRASI</b>	KEPALA DINAS	II
868	SEKRETARIAT	DINAS TRANSMIGRASI	SEKRETARIS	III
869	SEKRETARIAT	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
870	SEKRETARIAT	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
871	SEKRETARIAT	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
872	SEKRETARIAT	DINAS TRANSMIGRASI	BENDAHARA PENGELUARAN	
873	UPTD	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA UPTD BALAI LATIHAN TRANSMIGRASI	
874	UPTD	DINAS TRANSMIGRASI	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	IV
875	UPTD	DINAS TRANSMIGRASI	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
876	<b>AUDITOR</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	AUDITOR PENYELIA	
877	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR PERTAMA	
878	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR MUDA	
879	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR MADYA	
880	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH	AUDITOR UTAMA	
881	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	INSPEKTUR	II
882	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	III
883	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	III
884	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	III
885	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA	
886	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA	
887	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA	
888	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PENGAWAS PEMERINTAHAN UTAMA	
889	SEKRETARIAT	INSPEKTORAT DAERAH	SEKRETARIS	III
890	SEKRETARIAT	INSPEKTORAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	IV
891	SEKRETARIAT	INSPEKTORAT DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
892	SEKRETARIAT	INSPEKTORAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	
893	<b>BAGIAN TATA USAHA</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	III
894	BAGIAN TATA USAHA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	IV
895	BAGIAN TATA USAHA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	IV
896	BAGIAN TATA USAHA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	IV
897	BAGIAN TATA USAHA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	
898	BAGIAN TATA USAHA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN	
899	BAGIAN TATA USAHA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	
900	BIDANG KEPERAWATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	KEPALA BIDANG KEPERAWATAN	III
901	BIDANG KEPERAWATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	KEPALA SUB BIDANG ASUHAN KEPERAWATAN	IV

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
902	BIDANG KEPERAWATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	KEPALA SUB BIDANG BINA DIKLAT KEPERAWATAN	IV
903	BIDANG KEPERAWATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU KEPERAWATAN	IV
904	BIDANG PELAYANAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	KEPALA BIDANG PELAYANAN	III
905	BIDANG PELAYANAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENUNJANG MEDIK	IV
906	BIDANG PELAYANAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN MEDIK	IV
907	BIDANG PELAYANAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN	IV
908	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	III
909	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PROGRAM EVALUASI DAN LITBANG	IV
910	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	KEPALA SUB BIDANG REKAM MEDIK	IV
911	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	KEPALA SUB BIDANG PEMASARAN DAN INFORMASI	IV
912	<b>DIREKTUR</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>	DIREKTUR RSUD	
913	<b>BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>	KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	III
914	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN	IV
915	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SEKSI KERJA SAMA	IV
916	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA APARATUR	IV
917	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	III
918	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN	IV
919	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SEKSI KOORDINASI DAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH	IV
920	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL	IV
921	BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	III
922	BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	IV
923	BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENYULUHAN DAN PELATIHAN	IV
924	BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PENGAWASAN	IV
925	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	III
926	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	IV
927	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT	IV
928	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN	IV
929	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	II
930	SEKRETARIAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SEKRETARIS	III
931	SEKRETARIAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	IV
932	SEKRETARIAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	IV
933	SEKRETARIAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV
934	SEKRETARIAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	
935	<b>BAGIAN KEUANGAN</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	III
936	BAGIAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	IV
937	BAGIAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA SUBBAGIAN PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	IV
938	BAGIAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DPRD	BENDAHARA PENGELUARAN	

NO	NAMA UNIT KERJA	NAMA SUB UNIT KERJA	NAMA JABATAN	ESELONISASI
939	BAGIAN PERSIDANGAN	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN	III
940	BAGIAN PERSIDANGAN	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA SUBBAGIAN RISALAH, RAPAT DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN	IV
941	BAGIAN PERSIDANGAN	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, PELAPORAN DAN PERPUSTAKAAN	IV
942	BAGIAN UMUM DAN HUMAS	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS	III
943	BAGIAN UMUM DAN HUMAS	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN HUMAS	IV
944	BAGIAN UMUM DAN HUMAS	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA, PERLENGKAPAN, TRANTIB DAN PROTOKOL	IV
945	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	KEPALA SEKRETARIAT DPRD	II

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

**H. M. ALI BAAL MASDAR**